

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KELEMAHAN PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DAERAH

Gita Putri Agustina
Gputri56@gmail.com
Ikhsan Budi Riharjo

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

This research is meant to test the influence of environment control, risk measurement, control activity, information and communication also the monitoring to the weaknesses of internal control of government on the section in the local apparatus work unit (SKPD) of Surabaya city. The population is all employees of financial management in 30 the local apparatus work units (SKPD) in Surabaya city. The sample collection technique has been done by using purposive sampling. The analysis technique has been done by performing the multiple linear regressions analysis. The result of this research shows that the control environment has negative influence to the weaknesses of internal control of the government, risk measurement does not have any influence to the weaknesses of internal control of the government, and internal activity has positive influence to the weaknesses of internal control of the government, information and communication has negative influence to the weaknesses of internal control of the government as well as the monitoring does not have any influence to the weaknesses of internal control of the government on SKPD city of Surabaya.

Keywords: *Environment Control, Risk Measurement, Control Activity, Information and Communication, The Weaknesses of Internal Control.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh lingkungan pengendalian terhadap kelemahan pengendalian intern pemerintah, pengaruh penilaian risiko terhadap kelemahan pengendalian intern pemerintah, pengaruh aktivitas pengendalian terhadap kelemahan pengendalian intern pemerintah, pengaruh informasi dan komunikasi terhadap kelemahan pengendalian intern pemerintah serta pengaruh pemantauan terhadap kelemahan pengendalian intern pemerintah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Surabaya. Berdasarkan tinjauan teoretis, hipotesis penelitian ini menyatakan bahwa lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan berpengaruh negatif terhadap kelemahan pengendalian intern pemerintah. Populasi yang digunakan dalam penelitian adalah pegawai pengelola keuangan pada 30 SKPD Kota Surabaya. Teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling*. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lingkungan pengendalian berpengaruh negatif terhadap kelemahan pengendalian intern pemerintah, penilaian risiko tidak berpengaruh terhadap kelemahan pengendalian intern pemerintah, aktivitas pengendalian berpengaruh positif terhadap kelemahan pengendalian intern pemerintah, informasi dan komunikasi berpengaruh negatif terhadap kelemahan pengendalian intern pemerintah serta pemantauan tidak berpengaruh terhadap kelemahan pengendalian intern pemerintah pada SKPD kota Surabaya.

Kata Kunci: Lingkungan Pengendalian, Penilaian Risiko, Aktivitas Pengendalian, Informasi dan Komunikasi, Kelemahan Pengendalian Intern.

PENDAHULUAN

Otonomi daerah merupakan suatu transformasi paradigma dalam penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan di daerah dimana setiap daerah diberi wewenang untuk mengatur dan mengelola potensi dari daerahnya masing-masing. Pelaksanaan otonomi daerah bermula dari ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI) Nomor XV/MPR/1998 tentang penyelenggaraan otonomi daerah, pengaturan,

pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menjadi dasar hukum dikeluarkannya Undang-Undang (UU) No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia pada dasarnya bertujuan agar setiap daerah mampu memberdayakan daerahnya, dengan demikian tujuan pembangunan nasional dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dapat tercapai. Salah satu cara dalam mencapai tujuan tersebut adalah dengan mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah baik bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Transparansi dan akuntabilitas dapat dilihat dari penyajian laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan yang disajikan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Upaya dalam mencapai pemerintah yang transparan dan akuntabel bukan berarti tidak mengalami kendala. Kendala yang mungkin terjadi adalah adanya kecurangan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Akibat yang terjadi karena adanya kecurangan adalah tidak tercapainya tujuan dari organisasi, dimana dalam hal ini adalah organisasi pemerintah. Hal ini tentu saja tidak sejalan dengan tujuan pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih. Kecurangan yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah dapat dicegah dengan dilaksanakannya pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaan pemerintahan. Kecurangan yang terjadi biasanya dipicu karena lemahnya pengendalian intern dalam suatu organisasi baik organisasi swasta maupun organisasi pemerintah. Berdasarkan *Klynveld Peat Marwick Goerdelle (KPMG) Fraud Survey 2006* yang dilakukan di Carolina Amerika Serikat dalam Petrovits *et al.* (2010) ditemukan bahwa lemahnya pengendalian intern merupakan faktor utama penyebab terjadinya kecurangan yaitu sebesar 33% dari total kasus kecurangan yang terjadi. Faktor kedua adalah diabaikannya sistem pengendalian intern yang telah ada sebesar 24%.

Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap lemahnya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) diantaranya lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan. Apabila ke-lima faktor tersebut dilakukan dengan baik oleh setiap elemen pemerintah maka tujuan pemerintah akan tercapai dengan maksimal. Dalam lingkungan pemerintah Sistem Pengendalian Intern (SPI) diciptakan dengan upaya agar pelaksanaan kegiatan pemerintah dapat berjalan dengan maksimal dan tujuan pemerintah dapat tercapai dengan efisien dan efektif. Pelaksanaan SPI dapat dilihat dari bagaimana pemerintah dapat mengelola dan menyajikan laporan keuangan negara dengan andal, aset negara dikelola dengan aman dan adanya ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) No. 60 Tahun 2008 Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Bagi entitas pemerintah SPIP merupakan sistem pengendalian intern yang dapat dilaksanakan secara menyeluruh baik bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang digunakan sebagai alat untuk memantau dan memberi keyakinan bahwa tujuan yang telah ditetapkan pemerintah dapat tercapai. Tujuan yang tidak dapat dicapai dengan maksimal, maka akan menimbulkan adanya kelemahan dalam sistem pengendalian intern pemerintah. Penelitian mengenai pelaksanaan SPIP telah memperlihatkan bahwa Sistem Pengendalian Intern memiliki peran yang signifikan dalam menjaga kualitas laporan keuangan pemerintah.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah Apakah Lingkungan Pengendalian, Penilaian Risiko, Aktivitas

Pengendalian, Informasi dan Komunikasi serta Pemantauan berpengaruh terhadap Kelemahan Pengendalian Intern Pemerintah. Sesuai dengan latar belakang masalah dan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji secara empiris pengaruh lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan terhadap kelemahan pengendalian intern pemerintah.

TINJAUAN TEORETIS

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang diterapkan pada Instansi Pemerintah.

Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian merupakan elemen terpenting yang melandasi unsur-unsur lainnya dalam pengendalian. Lingkungan pengendalian berkaitan dengan orang, moralitas, integritas, kejujuran, dan kompetensi. Pimpinan instansi pemerintah dan seluruh organisasi yang menimbulkan perilaku positif dan mendukung terhadap pengendalian intern dan manajemen yang sehat melalui: (1) Penegakan integritas dan nilai etika, (2) Komitmen terhadap kompetensi, (3) Kepemimpinan yang kondusif, (4) Pembentukan struktur organisasi, (5) Pendelegasian tugas dan wewenang, (6) Penyusunan dan penerapan kebijakan SDM dan (7) Perwujudan peran pengawas internal. Menurut Arens (2004) lingkungan pengendalian terdiri dari tindakan, kebijakan dan prosedur yang mencerminkan keseluruhan sikap dari manajemen puncak, para direktur, dan pemilik dari suatu entitas mengenai pengendalian internal dan arti penting bagi entitas yang bersangkutan.

Penilaian Risiko

Risiko akan selalu dihadapi oleh semua organisasi dan instansi tanpa melihat ukuran, struktur atau industri suatu organisasi atau instansi tersebut. Tidak hanya pimpinan yang bertanggung jawab atas penilaian risiko yang akan dihadapi oleh organisasi atau instansi pemerintah, melainkan seluruh pegawai yang ada di dalamnya harus mampu mengidentifikasi, mengevaluasi, serta memantau kejadian yang akan menghambat pencapaian visi dan misi organisasi (Nella, 2014). Pengendalian intern harus memberikan penilaian atas risiko yang dihadapi unit organisasi baik dari luar maupun dari dalam. Penilaian risiko terdiri atas: (1) Identifikasi risiko dan (2) Analisis risiko.

Menurut PSAP No. 69 tahun 2008 penilaian risiko suatu entitas untuk tujuan pelaporan keuangan merupakan pengidentifikasian, analisis dan pengelolaan risiko yang relevan dengan penyusunan laporan keuangan yang disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Sedangkan menurut Bastian (2003: 16) penaksiran risiko untuk tujuan laporan keuangan adalah identifikasi, analisis, dan pengelolaan risiko entitas yang berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berterima umum (PABU).

Aktivitas Pengendalian

Aktivitas pengendalian membantu memastikan bahwa arahan pimpinan Instansi Pemerintah dilaksanakan. Aktivitas pengendalian harus efisien dan efektif dalam

pencapaian tujuan organisasi. Aktivitas pengendalian terdiri dari: (1) Reviu atas kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan, (2) Pembinaan sumber daya manusia, (3) Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi, (4) Pengendalian fisik aset, (5) Penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kerja, (6) Pemisahan fungsi, (7) Otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting, (8) Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian, (9) Pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya, (10) Akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya dan (11) Dokumentasi yang baik atas Sistem Pengendalian Intern serta transaksi dan kejadian penting.

Informasi dan Komunikasi

Informasi adalah hasil dari proses pengolahan data yang digunakan sebagai sarana untuk pengambilan keputusan, sedangkan komunikasi adalah proses penyampaian informasi kepada pihak lain baik secara langsung maupun tidak langsung. Informasi dan komunikasi pada dasarnya merupakan pendukung dari elemen sistem pengendalian intern lainnya. Inti dari informasi dan komunikasi adalah manajemen dan karyawan dapat memperoleh informasi dan dapat berkomunikasi dengan atasan dan atau rekan kerjanya yang memungkinkan mereka memahami tugas dan tanggung jawab secara baik.

Untuk menyelenggarakan komunikasi yang efektif, pimpinan harus memenuhi beberapa hal, yaitu: (1) Menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi dan (2) Mengelola, mengembangkan, dan memperbarui sistem informasi secara terus menerus.

Pemantauan

Pemantauan harus dapat menilai kualitas kinerja dari waktu ke waktu dan memastikan bahwa rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya dapat segera ditindak lanjuti. Pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan pemantauan sistem pengendalian intern. Pemantauan sistem pengendalian intern dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya.

Kelemahan Pengendalian Intern Pemerintah

Kelemahan Pengendalian intern merupakan kelemahan yang signifikan yang hasilnya jauh dari kondisi salah saji material pada laporan keuangan tahunan yang tidak dapat dicegah atau dideteksi. Adanya indikator untuk mengetahui tingkat kelemahan pengendalian intern menjadikan pemerintah daerah untuk memperhatikan kualitas pengendalian intern.

Kelemahan tersebut mengakibatkan permasalahan dalam aktivitas pengendalian yang menimbulkan kasus-kasus kelemahan pengendalian intern diantaranya: (1) Kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, yaitu kelemahan sistem pengendalian yang terkait kegiatan pencatatan akuntansi dan pelaporan keuangan, (2) Kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, yaitu kelemahan pengendalian yang terkait dengan pemungutan dan penyetoran penerimaan negara/daerah serta pelaksanaan program/kegiatan pada entitas yang diperiksa dan (3) Kelemahan struktur pengendalian intern, yaitu kelemahan yang terkait dengan ada/tidak adanya struktur pengendalian intern atau efektivitas struktur pengendalian intern yang ada dalam entitas yang diperiksa.

Perumusan Hipotesis

Pengaruh Lingkungan Pengendalian Terhadap Kelemahan Pengendalian Intern Pemerintah

Lingkungan pengendalian merupakan salah satu faktor dalam pelaksanaan SPIP. Lingkungan pengendalian yang dilaksanakan dengan baik mampu menciptakan atmosfer

yang kondusif untuk mendorong tercapainya sistem pengendalian intern yang efektif. Rumondang (2010) menyatakan bahwa lingkungan pengendalian merupakan kondisi dalam instansi pemerintah yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah. Maka diperoleh hipotesis yang akan dikembangkan yaitu:

H1: Lingkungan Pengendalian berpengaruh negatif terhadap Kelemahan Pengendalian Intern Pemerintah

Pengaruh Penilaian Risiko Terhadap Kelemahan Pengendalian Intern Pemerintah

Setiap organisasi baik organisasi swasta maupun organisasi pemerintah pasti menghadapi risiko, dengan demikian dalam setiap organisasi harus menilai risiko yang mungkin akan dihadapi oleh organisasinya. Keberhasilan dalam mengenali risiko akan dipengaruhi oleh kekuatan lingkungan pengendalian yang terbentuk. Pada penelitian yang dilakukan oleh Nella (2014) penilaian risiko merupakan faktor yang mempengaruhi pelaksanaan SPIP. Maka diperoleh hipotesis yang akan dikembangkan yaitu:

H2: Penilaian Risiko berpengaruh negatif terhadap Kelemahan Pengendalian Intern Pemerintah

Pengaruh Aktivitas Pengendalian Terhadap Kelemahan Pengendalian Intern Pemerintah

Aktivitas pengendalian merupakan prosedur yang dilakukan untuk memastikan bahwa tindakan yang dilakukan untuk menghadapi risiko telah dilaksanakan sebagaimana mestinya untuk pencapaian tujuan organisasi pemerintah. Aktivitas pengendalian berpengaruh terhadap pelaksanaan SPIP (Nella, 2014). Maka diperoleh hipotesis yang akan dikembangkan yaitu:

H3: Aktivitas pengendalian berpengaruh negatif terhadap Kelemahan Pengendalian Intern Pemerintah

Pengaruh Informasi dan Komunikasi Terhadap Kelemahan Pengendalian Intern Pemerintah

Informasi dan komunikasi harus diselenggarakan secara efektif. Untuk melaksanakan komunikasi yang efektif dapat dilakukan melalui pemanfaatan sarana komunikasi, mengelola dan mengembangkan sistem informasi secara terus menerus. Informasi dan komunikasi berpengaruh terhadap pelaksanaan SPIP (Nella, 2014). Maka diperoleh hipotesis yang akan dikembangkan yaitu:

H4: Informasi dan Komunikasi berpengaruh negatif terhadap Kelemahan Pengendalian Intern Pemerintah

Pengaruh Pemantauan Terhadap Kelemahan Pengendalian Intern Pemerintah

Pemantauan dilakukan untuk menilai kinerja dari waktu ke waktu dan untuk memastikan tindak lanjut dari hasil revidi. Kegiatan pemantauan dapat menjadi dasar untuk menciptakan sistem pengendalian intern yang lebih baik dari sistem yang sebelumnya. Pemantauan pengendalian intern dilakukan pada semua unsur dalam rangka memantau efektivitas pelaksanaan pengendalian (Sucipto, 2012). Dapat disimpulkan bahwa pemantauan merupakan faktor keberhasilan SPIP. Maka diperoleh hipotesis yang akan dikembangkan yaitu:

H5: Pemantauan berpengaruh negatif terhadap Kelemahan Pengendalian Intern Pemerintah

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Gambaran dari Populasi (Objek) Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah penelitian kuantitatif dimana peneliti menguji hubungan suatu variabel dengan variabel yang lain. Dalam penelitian ini

terdapat dua variabel yang digunakan yaitu variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen dalam penelitian ini terdiri dari lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan, sedangkan variabel dependennya adalah kelemahan Pengendalian Intern.

Populasi adalah jumlah dari sekumpulan subjek atau objek pada suatu wilayah tertentu yang memiliki karakteristik untuk dipelajari yang digunakan untuk mengambil suatu keputusan dalam penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai pengelola keuangan pada 30 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di Kota Surabaya.

Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah menggunakan *purposive sampling* dimana pengambilan sampel dilakukan secara tidak acak melainkan menggunakan sampel dengan pertimbangan-pertimbangan yang informasinya berguna untuk mendukung penelitian ini. Kriteria yang digunakan untuk menentukan pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah pegawai yang memiliki peran dalam bidang keuangan. Responden dalam penelitian ini adalah kepala bagian keuangan dan 2 orang staf akuntansi pada SKPD kota Surabaya dengan jumlah responden 90 dari 30 SKPD.

Teknik Pengumpulan Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data subjek. Data subjek merupakan jenis data berupa opini, pengalaman, sikap seseorang atau sekelompok orang yang menjadi subjek penelitian (*responden*). Dalam penelitian ini data yang dianalisis adalah data primer. Data tersebut diperoleh langsung dari responden yang menjadi objek penelitian dengan menggunakan daftar pertanyaan dalam bentuk kuesioner untuk mengumpulkan informasi yang dibutuhkan.

Variabel dan Definisi Operasional Variabel

Kelemahan Pengendalian Intern

Kelemahan pengendalian intern merupakan kelemahan yang signifikan yang jauh dari kondisi salah saji material yang dapat dilihat dari laporan keuangan yang tidak dapat dicegah atau dideteksi. Dalam penelitian ini kelemahan pengendalian intern pemerintah diprosikan dengan kecurangan (*fraud*). Kecurangan diukur menggunakan instrumen yang telah diukur oleh Herman (2013) yang dikembangkan dari *Fraud Triangle Theory*, terdiri dari 3 indikator, yaitu: (1) Dorongan (*Pressure*), (2) Peluang (*Opportunity*) dan (3) Rasionalisasi (*Rationalization*). Daftar pertanyaan terdiri dari 10 pertanyaan. Pertanyaan nomor 1 sampai dengan 6 ditujukan untuk menjelaskan kecurangan dari indikator peluang (*oportunity*), pertanyaan nomor 7 dan 9 ditujukan untuk menjelaskan kecurangan dari indikator rasionalisasi (*rattionalitation*), dan pertanyaan nomor 8 dan 10 ditujukan untuk menjelaskan kecurangan dari indikator dorongan (*pressure*). Frekuensi kecurangan diukur berdasarkan skala *likert* 1-5. Skala 1 TP (Tidak Pernah) artinya sangat rendah dan skala 5 (selalu) artinya sangat tinggi.

Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian pada instansi pemerintah pimpinan harus mampu menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif, penegakan integrasi dan nilai etika dalam pelaksanaan SPIP. Variabel lingkungan pengendalian diukur menggunakan instrumen yang telah diukur oleh Putri (2013) yang dikembangkan dari PP Nomor 60 Tahun 2008, terdiri dari 4 indikator, yaitu: (1) Penegakan integritas dan nilai etika, (2) Pendelegasian tugas dan wewenang, (3) Kepemimpinan yang kondusif dan (4) Pembentukan struktur organisasi. Daftar pertanyaan terdiri dari 4

pertanyaan. Frekuensi lingkungan pengendalian diukur berdasarkan skala *likert* 1-5. Skala 1 TP (Tidak Pernah) artinya sangat rendah dan skala 5 (selalu) artinya sangat tinggi.

Penilaian Risiko

Dalam usaha untuk mencapai tujuan instansi dan dan tujuan kegiatan pimpinan instansi harus melakukan penilaian risiko sesuai dengan pedoman yang ada yaitu pada peraturan perundang-undangan. Variabel penilaian risiko diukur menggunakan instrumen yang telah diukur oleh Putri (2013) yang dikembangkan dari PP Nomor 60 Tahun 2008, terdiri dari 4 indikator, yaitu: (1) Identifikasi risiko pelaksanaan program dan kegiatan, (2) Perhatian pimpinan terhadap risiko yang ditimbulkan atas program dan kegiatan, (3) Antisipasi timbulnya risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian sasaran dan (4) Analisis risiko secara lengkap dan menyeluruh tentang dampak pelaksanaan program dan kegiatan. Daftar pertanyaan terdiri dari 4 pertanyaan. Frekuensi penilaian risiko diukur berdasarkan skala *likert* 1-5. Skala 1 TP (Tidak Pernah) artinya sangat rendah dan skala 5 (selalu) artinya sangat tinggi.

Aktivitas Pengendalian

Aktivitas pengendalian merupakan hal yang wajib dilakukan oleh instansi pemerintah sesuai dengan ukuran dan sifat dari instansi yang bersangkutan hal ini bertujuan untuk tercapainya tujuan instansi secara maksimal. Variabel aktivitas pengendalian diukur menggunakan instrumen yang telah diukur oleh Putri (2013) yang dikembangkan dari PP Nomor 60 Tahun 2008, terdiri dari 4 indikator, yaitu: (1) Identifikasi kegiatan pengendalian untuk menangani risiko, (2) Keterlibatan pimpinan instansi dalam penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan, (3) Pencatatan dilakukan di seluruh siklus transaksi dan (4) Evaluasi kegiatan pengendalian secara berkala. Daftar pertanyaan terdiri dari 4 pertanyaan. Frekuensi aktivitas pengendalian diukur berdasarkan skala *likert* 1-5. Skala 1 TP (Tidak Pernah) artinya sangat rendah dan skala 5 (selalu) artinya sangat tinggi.

Informasi dan Komunikasi

Informasi dan komunikasi digunakan instansi sebagai upaya dalam memperoleh informasi dan mengkomunikasikan dengan elemen yang terdapat dalam instansi pemerintah agar dapat memahami setiap tanggung jawab dan tugas pengendalian secara baik. Variabel informasi dan komunikasi diukur menggunakan instrumen yang telah diukur oleh Putri (2013) yang dikembangkan dari PP Nomor 60 Tahun 2008, terdiri dari 4 indikator, yaitu: (1) Ketepatan waktu penyediaan informasi, (2) Tugas dibebankan pada pegawai dikomunikasikan dengan jelas, (3) Pegawai memiliki saluran komunikasi informasi ke atas selain melalui atasan langsung dan (4) Sikap perilaku yang bisa atau tidak, dikomunikasikan secara jelas kepada pegawai. Daftar pertanyaan terdiri dari 4 pertanyaan. Frekuensi informasi dan komunikasi diukur berdasarkan skala *likert* 1-5. Skala 1 TP (Tidak Pernah) artinya sangat rendah dan skala 5 (selalu) artinya sangat tinggi.

Pemantauan

Pemantauan dilaksanakan untuk dapat menilai kinerja instansi dari waktu ke waktu. Pemantauan sistem pengendalian intern dilakukan melalui pemantauan berkelanjutan yang terkait dengan pelaksanaan tugas. Variabel pemantauan diukur menggunakan instrumen yang telah diukur oleh Putri (2013) yang dikembangkan dari PP Nomor 60 Tahun 2008, terdiri dari 4 indikator, yaitu: (1) Pemantauan oleh SKPD, (2) Tindak lanjut pimpinan atas rekomendasi temuan dari aparat pengawas intern, (3) Pimpinan melakukan review dan evaluasi temuan yang menunjukkan adanya kelemahan dan perlu perbaikan dan (4) Pimpinan menetapkan tindakan yang memadai untuk menindak lanjuti rekomendasi

temuan dengan tepat. Daftar pertanyaan terdiri dari 4 pertanyaan. Frekuensi pemantauan diukur berdasarkan skala *likert* 1-5. Skala 1 TP (Tidak Pernah) artinya sangat rendah dan skala 5 (selalu) artinya sangat tinggi.

Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif dilakukan pada sampel yang di ambil dengan tujuan untuk generalisasi pada populasi dimana suatu sampel diambil. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Analisis regresi linier berganda adalah analisis mengenai beberapa variabel independen dengan satu variabel dependen. Analisis regresi linier berganda dimaksudkan untuk meramalkan bagaimana naik turunnya variabel dependen apabila variabel independen digunakan sebagai faktor prediksi.

Analisis regresi dimaksudkan untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih, juga dapat menunjukkan arah hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen. Model persamaan regresi untuk menguji hipotesis dengan formula sebagai berikut:

$$KPI = a + b_1LP + b_2PR + b_3AP + b_4IK + b_5P + e$$

Dimana:

KPI = Kelemahan Pengendalian Intern

A = Konstanta

LP = Lingkungan Pengendalian

PR = Penilaian Risiko

AP = Aktivitas Pengendalian

IK = Informasi dan Komunikasi

P = Pemantauan

b1 = Koefisien Regresi Lingkungan Pengendalian

b2 = Koefisien Regresi Penilaian Risiko

b3 = Koefisien Regresi Aktivitas Pengendalian

b4 = Koefisien Regresi Informasi dan Komunikasi

b5 = Koefisien Regresi Pemantauan

e = Error(pengganggu)

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan uji kualitas data diantaranya uji validitas dan uji reliabilitas. Setelah memenuhi uji kualitas data kemudian dilakukan uji asumsi klasik diantaranya uji normalitas, uji multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas. Setelah semua data dinyatakan lolos uji asumsi klasik maka dilanjutkan dengan melakukan uji kelayakan model (uji F), uji hipotesis (uji T) dan uji koefisien determinasi (R^2).

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Uji Kualitas Data

Uji Validitas

Uji validitas dilakukan dengan menghitung korelasi masing-masing pertanyaan dengan skor totalnya. Dalam penelitian ini diukur dengan analisis *person correlation*, dimana jika total dari nilai <0.05 maka data dikatakan valid (Ghozali, 2011). Setelah dilakukan pengujian, seluruh item pertanyaan memiliki tingkat signifikansi di bawah 0,05 sehingga seluruh item pertanyaan dikatakan valid. Hasil selengkapnya dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1
Hasil Uji Validitas

Variabel	Item	Person Correlation(Validitas)	Signifikan	Keterangan
Lingkungan Pengendalian	LP1	0,670	0,000	Valid
	LP2	0,765	0,000	Valid
	LP3	0,776	0,000	Valid
	LP4	0,696	0,000	Valid
Penilaian Risiko	PR1	0,797	0,000	Valid
	PR2	0,622	0,000	Valid
	PR3	0,844	0,000	Valid
	PR4	0,724	0,000	Valid
Aktivitas Pengendalian	AP1	0,762	0,000	Valid
	AP2	0,822	0,000	Valid
	AP3	0,816	0,000	Valid
	AP4	0,854	0,000	Valid
Informasi dan Komunikasi	IK1	0,712	0,000	Valid
	IK2	0,722	0,000	Valid
	IK3	0,688	0,000	Valid
	IK4	0,641	0,000	Valid
Pemantauan	P1	0,704	0,000	Valid
	P2	0,725	0,000	Valid
	P3	0,769	0,000	Valid
	P4	0,690	0,000	Valid
Kelemahan Pengendalian Intern	KPI1	0,816	0,000	Valid
	KPI2	0,242	0,036	Valid
	KPI3	0,242	0,036	Valid
	KPI4	0,242	0,036	Valid
	KPI5	0,623	0,000	Valid
	KPI6	0,623	0,000	Valid
	KPI7	0,770	0,000	Valid
	KPI8	0,776	0,000	Valid
	KPI9	0,511	0,000	Valid
	KPI10	0,776	0,000	Valid

Sumber: Data Primer Diolah, 2016

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan teknik *cronbach's alpha*. Dengan teknik ini kriteria penelitian dikatakan reliabel apabila nilai koefisien alpha lebih besar dari 0,6 (Malhotra, 2004: 268). Hasil pengujian reliabilitas data dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach Alpha	Keterangan
Lingkungan Pengendalian	0,704	Reliabel
Penilaian Risiko	0,722	Reliabel
Aktivitas Pengendalian	0,830	Reliabel
Informasi dan Komunikasi	0,616	Reliabel
Pemantauan	0,695	Reliabel
Kelemahan Pengendalian Intern	0,776	Reliabel

Sumber: Data Primer Diolah, 2016

Berdasarkan hasil dari uji reliabilitas pada tabel 2, menunjukkan bahwa koefisien *cronbach alpha* pada tiap variabel *cronbach alpha* >0,6 dan ini menunjukkan bahwa instrumen yang digunakan dalam penelitian ini reliabel.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Model regresi yang baik adalah dimana model yang memiliki distribusi normal atau mendekati normal. Uji normalitas akan terpenuhi apabila sampel yang digunakan lebih dari 30. Pada penelitian ini peneliti menggunakan uji normalitas non parametrik yaitu *one sample kolmogorof-smirnov test* (Ghozali, 2011). Hasil analisis data dapat dilihat pada tabel 3.

Tabel 3
Hasil Uji Normalitas

Variabel	Kolmogorof-Smirnof-Test	Asymp.Sig. (2-tailed)	Kesimpulan
Lingkungan Pengendalian	1,204	0,110	Distribusi Normal
Penilaian Risiko	1,014	0,256	Distribusi Normal
Aktivitas Pengendalian	1,093	0,183	Distribusi Normal
Informasi dan Komunikasi	1,282	0,075	Distribusi Normal
Pemantauan	1,233	0,096	Distribusi Normal
Kelemahan Pengendalian Intern	1,310	0,065	Distribusi Normal

Sumber: Data Primer Diolah, 2016

Hasil pengujian menunjukkan nilai *Asymp. Sig (2-tailed)*, untuk tiap variabel memiliki nilai > 0,05 sehingga semua variabel dalam penelitian ini terdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas. Untuk mengetahui ada tidaknya indikasi npada multikolinearitas dilakukan dengan melihat nilai *tolerance* dan *variance inflation factor* (VIF). Masing-masing variabel independen harus memiliki nilai *tolerance* >0,1 dan nilai VIF < 10. Hasil uji multikolinearitas dapat dilihat pada tabel 4.

Tabel 4
Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
Lingkungan Pengendalian	0,785	1,274	Bebas Multikolinearitas
Penilaian Risiko	0,284	3,515	Bebas Multikolinearitas
Aktivitas Pengendalian	0,268	3,733	Bebas Multikolinearitas
Informasi dan Komunikasi	0,573	1,745	Bebas Multikolinearitas
Pemantauan	0,884	1,131	Bebas Multikolinearitas

Sumber: Data Primer Diolah, 2016

Berdasarkan tabel 4 hasil pengujian multikolinearitas pada semua variabel independen memiliki nilai *tolerance* > 0,1 dan nilai VIF semua variabel independen memiliki nilai < 10. Maka dapat disimpulkan bahwa dalam model regresi ini tidak terjadi multikolinearitas antar variabel independen.

Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas adalah pengujian asumsi residual dengan varian tidak konstan. Model regresi yang baik adalah jika varians dari satu pengamatan ke pengamatan lain tetap. Metode yang digunakan untuk mendeteksi heterokedastisitas adalah dengan uji *glejser*

dengan probabilitas signifikansinya di atas tingkat kepercayaan = 0,05. Hasil uji heterokedastisitas pada tabel 5.

Tabel 5
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Sig	Keterangan
Lingkungan Pengendalian	0,437	Bebas Heteroskedastisitas
Penilaian Risiko	0,446	Bebas Heteroskedastisitas
Aktiitas Pengendalian	0,600	Bebas Heteroskedastisitas
Informasi dan Komunikasi	0,164	Bebas Heteroskedastisitas
Pemantauan	0,508	Bebas Heteroskedastisitas

Sumber: Data Primer Diolah, 2016

Berdasarkan tabel 5 semua variabel independen memiliki nilai signifikansi di atas 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa dalam model regresi ini semua variabel independen bebas heteroskedastisitas.

Analisis Regresi Linier Berganda

Persamaan regresi dilakukan adalah untuk melakukan pendugaan atau taksiran variasi variabel dependen yang disebabkan oleh variasi nilai variabel independen. Berdasarkan data yang telah dikumpulkan, dengan menggunakan program SPSS versi 20, maka diperoleh hasil olahan pada tabel 6.

Tabel 6
Hasil Uji Regresi

Variabel	Koef Regresi	t hitung	Sig.
Konstanta	0,762	2,508	0,015
Lingkungan Pengendalian	-0,113	-2,625	0,011
Penilaian Risiko	-0,038	-0,467	0,642
Aktivitas Pengendalian	0,216	2,733	0,008
Informasi dan Komunikasi	-0,135	-2,193	0,032
Pemantauan	0,033	0,817	0,417
R Square		0,230	
Adjusted R ²		0,175	
F		4,131	
Sig		0,002	

Sumber: Data Primer Diolah, 2016

Berdasarkan tabel 6, maka persamaan regresi yang dibuat adalah sebagai berikut:

$$KPI = 0,762 - 0,113 LP - 0,038 PR + 0,216 AP - 0,135 IK + 0,033 P$$

Koefisien regresi yang bertanda positif menunjukkan perubahan yang searah antara variabel independen terhadap variabel dependen. Sedangkan koefisien regresi yang bertanda negatif menunjukkan perubahan yang berlawanan antara variabel independen terhadap variabel dependen. Dalam perhitungan menunjukkan variabel lingkungan pengendalian, penilaian risiko dan informasi dan komunikasi memiliki tanda negatif, sedangkan untuk variabel aktivitas pengendalian dan pemantauan memiliki tanda positif.

Koefisien Determinasi (R²)

Dari hasil uji regresi, maka dapat dilihat bahwa nilai statistik F adalah 4,131 dengan nilai signifikan 0.002, hal ini menunjukkan bahwa lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan mempengaruhi kelemahan pengendalian intern sehingga pengujian hipotesis dapat dianalisis lebih lanjut. Tabel 6 memperlihatkan bahwa adjusted R² sebesar 0,175. Hal ini menunjukkan bahwa 17,5

% kelemahan pengendalian intern dipengaruhi oleh lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan, sedangkan sisanya sebesar 82,5 % dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti.

Analisis dan Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda. Pada penelitian ini hipotesis yang diajukan adalah lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi dan pemantauan yang mempengaruhi kelemahan pengendalian intern.

Hasil pengujian hipotesis pertama (H1) menyatakan bahwa lingkungan pengendalian berpengaruh negatif terhadap kelemahan pengendalian intern. Berdasarkan tabel 6 nilai t hasil perhitungan adalah -2,625 dengan tingkat signifikansi 0,011. Tingkat signifikansi ini kurang dari 0,05. Sedangkan koefisien regresinya menunjukkan arah negatif sebesar -0,113. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil pengujian hipotesis pertama sejalan dengan hipotesis yang diajukan yaitu lingkungan pengendalian berpengaruh negatif terhadap kelemahan pengendalian intern sehingga **hipotesis pertama diterima**.

Hasil pengujian hipotesis kedua (H2) menyatakan bahwa penilaian risiko berpengaruh negatif terhadap kelemahan pengendalian intern. Berdasarkan tabel 6 nilai t hasil perhitungan adalah -0,467 dengan tingkat signifikansi 0,642. Tingkat signifikansi ini lebih dari 0,05. Sedangkan koefisien regresinya menunjukkan arah negatif sebesar -0,038. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil pengujian hipotesis kedua tidak sejalan dengan hipotesis yang diajukan yaitu penilaian risiko tidak berpengaruh terhadap kelemahan pengendalian intern sehingga **hipotesis kedua ditolak**.

Hasil pengujian hipotesis ketiga (H3) menyatakan bahwa aktivitas pengendalian berpengaruh negatif terhadap kelemahan pengendalian intern. Berdasarkan tabel 6 nilai t hasil perhitungan adalah 2,733 dengan tingkat signifikansi 0,008. Tingkat signifikansi ini kurang dari 0,05. Sedangkan koefisien regresinya menunjukkan arah positif sebesar 0,216. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil pengujian hipotesis ketiga tidak sejalan dengan hipotesis yang diajukan yaitu aktivitas pengendalian berpengaruh positif terhadap kelemahan pengendalian intern sehingga **hipotesis ketiga ditolak**.

Hasil pengujian hipotesis ke-empat (H4) menyatakan bahwa informasi dan komunikasi berpengaruh negatif terhadap kelemahan pengendalian intern. Berdasarkan tabel 6 nilai t hasil perhitungan adalah -2,193 dengan tingkat signifikansi 0,032. Tingkat signifikansi ini kurang dari 0,05. Sedangkan koefisien regresinya menunjukkan arah negatif sebesar -0,135. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil pengujian hipotesis ke-empat sejalan dengan hipotesis yang diajukan yaitu informasi dan komunikasi berpengaruh negatif terhadap kelemahan pengendalian intern sehingga **hipotesis ke-empat diterima**.

Hasil pengujian hipotesis kelima (H5) menyatakan bahwa pemantauan berpengaruh negatif terhadap kelemahan pengendalian intern. Berdasarkan tabel 6 nilai t hasil perhitungan adalah 0,817 dengan tingkat signifikansi 0,417. Tingkat signifikansi ini lebih dari 0,05. Sedangkan koefisien regresinya menunjukkan arah positif sebesar 0,033. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil pengujian hipotesis kelima tidak sejalan dengan hipotesis yang diajukan yaitu pemantauan tidak berpengaruh terhadap kelemahan pengendalian intern sehingga **hipotesis kelima ditolak**.

Pembahasan

Pengaruh Lingkungan Pengendalian terhadap Kelemahan Pengendalian Intern

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan diperoleh hasil bahwa lingkungan pengendalian berpengaruh negatif terhadap kelemahan pengendalian intern. Semakin baik kondisi lingkungan pengendalian dalam SKPD maka akan mengurangi kelemahan pengendalian intern. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Nella (2014) dinyatakan bahwa

lingkungan pengendalian merupakan faktor yang memiliki persentase tertinggi dalam pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah. Sejalan dengan penelitian Rumondang (2010) lingkungan pengendalian merupakan kondisi dalam instansi pemerintah yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah. Hal ini terjadi sebab faktor yang menetapkan corak suatu organisasi dan mempengaruhi kesadaran akan pengendalian adalah lingkungan pengendalian.

Salah satu faktor terjadinya kecurangan adalah dikarenakan peluang. Kecurangan yang terjadi karena peluang adalah kecurangan yang terjadi karena lemahnya pengendalian intern pada suatu instansi. Lingkungan pengendalian yang tercipta dengan baik akan menekan terjadinya kecurangan, sebab tidak adanya peluang/ kesempatan untuk melakukan kecurangan. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa lingkungan pengendalian yang efektif memberikan pengaruh yang negatif terhadap kecenderungan kasus kelemahan pengendalian intern. Dengan menciptakan lingkungan pengendalian yang baik SKPD dapat terhindar dari kelemahan pengendalian intern. Tanpa lingkungan pengendalian yang baik, kendala atau resiko yang dapat menyebabkan kerugian besar dapat berlangsung lama.

Pengaruh Penilaian Risiko terhadap Kelemahan Pengendalian Intern

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan diperoleh hasil bahwa penilaian risiko tidak berpengaruh terhadap kelemahan pengendalian intern karena nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Hasil ini mengidentifikasi bahwa semakin tinggi atau semakin rendahnya penilaian risiko yang dilakukan tidak akan mempengaruhi terjadinya kelemahan pengendalian intern. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Sahrani (2012) yang menyimpulkan bahwa penilaian risiko tidak berpengaruh signifikan terhadap kecenderungan *fraud* dana BOS dengan koefisien positif. Sahrani (2012) menyatakan bahwa penilaian risiko tidak berpengaruh dalam menurunkan kecenderungan kecurangan dana BOS dan dapat disimpulkan sistem penilaian risiko yang diterapkan di sekolah yang menjadi sampel tidak berjalan efektif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penilaian risiko tidak berpengaruh sama sekali terhadap kelemahan pengendalian intern. Hal ini terjadi karena kecurangan memang bisa dicegah dengan tercapainya sistem penilaian risiko yang baik, namun sistem penilaian risiko yang baik tidak dapat menjamin bahwa kecurangan tidak akan terjadi sama sekali. Maka, dengan tercipta atau tidaknya penilaian risiko yang efektif tidak berpengaruh terhadap terjadinya kelemahan pengendalian intern.

Pengaruh Aktivitas Pengendalian terhadap Kelemahan Pengendalian Intern

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan diperoleh hasil bahwa aktivitas pengendalian berpengaruh positif terhadap kelemahan pengendalian intern. Semakin tinggi aktivitas pengendalian dalam SKPD maka akan semakin tinggi pula kasus kelemahan pengendalian intern. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sahrani (2012) aktivitas pengendalian berpengaruh positif terhadap kecenderungan *fraud* dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Menurut penelitian yang dilakukan oleh Purwitasari (2013), walaupun pengendalian intern merupakan pihak yang memiliki kewajiban yang paling besar dalam masalah pencegahan, namun pengendalian intern tidak bertanggung jawab atas terjadinya kecurangan. Hal ini dapat menjadi alasan mengapa aktivitas pengendalian dapat meningkatkan kelemahan pengendalian intern. Sebab, kecurangan memang bisa dicegah dengan tercapainya aktivitas pengendalian yang baik, namun tidak dapat menjamin bahwa kecurangan tidak akan terjadi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa aktivitas pengendalian berpengaruh positif terhadap kelemahan pengendalian intern. Aktivitas pengendalian yang telah terlaksana dengan baik, belum tentu akan menekan angka kasus kelemahan pengendalian intern,

itulah mengapa aktivitas pengendalian yang tinggi juga mampu meningkatkan kelemahan pengendalian intern.

Pengaruh Informasi dan Komunikasi terhadap Kelemahan Pengendalian Intern

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan diperoleh hasil bahwa informasi dan komunikasi berpengaruh negatif terhadap kelemahan pengendalian intern. Semakin lancarnya alur informasi dan komunikasi dalam SKPD maka akan mengurangi kasus kelemahan pengendalian intern. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nella (2014) informasi dan komunikasi berpengaruh terhadap pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah. Sehingga informasi dan komunikasi yang berjalan dengan efektif dapat meningkatkan pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah yang efektif.

Berdasarkan jawaban responden mengenai informasi dan komunikasi, faktor ini telah dilaksanakan dengan baik dilihat dari nilai rata - rata jawaban yang termasuk dalam kategori sangat tinggi. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa informasi dan komunikasi memiliki pengaruh yang negatif terhadap kelemahan pengendalian intern. Terciptanya informasi dan komunikasi yang baik maka akan menekan kasus kelemahan pengendalian intern pemerintah. Tanpa informasi dan komunikasi yang baik maka akan meningkatkan kasus kelemahan pengendalian intern dan menyebabkan kendala yang dapat berlangsung lama.

Pengaruh Pemantauan terhadap Kelemahan Pengendalian Intern

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan diperoleh hasil bahwa pemantauan tidak berpengaruh terhadap kelemahan pengendalian intern sebab nilai signifikansinya lebih besar dari pada 0,05. Hasil ini mengidentifikasi bahwa semakin tinggi atau semakin rendahnya pemantauan yang dilakukan tidak akan mempengaruhi terjadinya kasus kelemahan pengendalian intern. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ariani (2013) yang menyimpulkan bahwa *monitoring* tidak berpengaruh terhadap *fraud* pada BLU UIN Sunan Kalijaga. Pemantauan yang dilakukan pada akhir periode menyebabkan pada masa periode berjalan kegiatan kecurangan akan tetap berlangsung. Pada saat pemantauan dilakukan memang akan mengungkap adanya kelemahan pengendalian intern yang terjadi, namun tidak dapat mencegah terjadinya kelemahan pengendalian yang terjadi pada saat periode berjalan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemantauan tidak berpengaruh sama sekali terhadap kelemahan pengendalian intern. Sehingga, terciptanya kegiatan pemantauan yang efektif belum tentu dapat menekan kelemahan pengendalian intern. hal ini juga dapat diartikan bahwa pemantauan yang dilakukan di lingkungan SKPD Kota Surabaya belum dilaksanakan dengan efektif.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan faktor - faktor yang mempengaruhi kelemahan pengendalian intern pemerintah daerah pada SKPD Kota Surabaya. Berdasarkan hasil analisis data dan pengujian hipotesis, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Lingkungan pengendalian serta Informasi dan Komunikasi yang diciptakan dan diterapkan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kota Surabaya berpengaruh negatif terhadap Kelemahan Pengendalian Intern, Penilaian risiko dan Pemantauan yang diterapkan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kota Surabaya tidak berpengaruh terhadap kelemahan pengendalian intern, serta Aktivitas pengendalian yang diterapkan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kota Surabaya berpengaruh positif terhadap kelemahan pengendalian intern.

Saran

Saran yang dapat diberikan berdasarkan penelitian ini adalah: (1) SKPD Kota Surabaya berupaya untuk mempertahankan dan bila perlu meningkatkan lingkungan pengendalian serta informasi dan komunikasi yang efektif pada setiap elemen, karena pada penelitian ini lingkungan pengendalian serta informasi dan komunikasi dapat berpengaruh negatif pada kelemahan pengendalian intern, (2) peneliti selanjutnya diharapkan agar memperbanyak sampel penelitian dan untuk hasil yang lebih baik, perlu ditambahkan metode lain selain penyebaran kuesioner seperti metode interview dan dokumentasi untuk mendukung penjelasan hasil penelitian dan (3) bagi peneliti selanjutnya dapat meneliti variabel lain yang dapat mempengaruhi kelemahan pengendalian intern seperti moralitas individu.

DAFTAR PUSTAKA

- Arens, A.A., R.J. Elder, dan M.S. Beasley. 2004. *Auditing dan Pelayanan Verifikasi*. Edisi sembilan. PT. Indeks IKAPI. Jakarta.
- Ariani, L. 2013. Pengaruh Lingkungan Pengendalian, Penilaian Risiko, Kegiatan Pengendalian, Informasi dan Komunikasi, serta *Monitoring* terhadap *Fraud* (Kecurangan) pada Badan Layanan Umum. *Skripsi*. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Yogyakarta.
- Bastian, I. 2003. *Akuntansi Sektor Publik*. Pusat Studi Akuntansi. Jakarta.
- Ghozali, I. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS19*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Herman, L. A. 2013. Pengaruh Keadilan Organisasi dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kecurangan. *Jurnal Akuntansi*. Universitas Negeri Padang. Padang.
- Malhotra, N. K. 2004. *Marketing Research: An Applied Orientation*. 4th Edition. Pearson Education Inc. New Jersey.
- Nella, R. M. 2014. Analisis Faktor Dominan Dalam Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Pemerintah Kabupaten Agam Tahun 2014. *Skripsi*. Universitas Negeri Padang. Padang.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Sistem *Pengendalian Intern Pemerintah*.
- Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 69 Tahun 2008 tentang *Pertimbangan atas Pengendalian Intern dalam Audit Laporan Keuangan*.
- Petrovits, C., C. Shakespeare, dan A. Shih. 2010. *The Causes and Consequences of Internal Control Problem in Nonprofit Organization*.
- Purwitasari, A. 2013. Pengaruh Pengendalian Intern dan Komitmen Organisasi dalam Pencegahan *Fraud* Pengadaan Barang. *Skripsi*. Universitas Widyatama Bandung. Bandung.
- Putri, G. Y. 2013. Pengaruh Komitmen Organisasi dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terhadap Kinerja Manajerial SKPD. *Skripsi*. Universitas Negeri Padang. Padang.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang *Pemerintahan Daerah*.
- Rumondang. 2010. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Pemerintah Kota Padang. *Skripsi*. Universitas Negeri Padang. Padang.
- Sahrani, A. 2012. Analisis Penerapan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kecenderungan *Fraud* Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). *Skripsi*. Universitas Trunojoyo Madura. Madura.
- Sucipto, A. P. 2012. Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam Pengelolaan keuangan negara. *Adipatisucipto.blogspot.com/2012/01/penerapan-spip.html?m=1*. 16 Oktober 2015 (17.43).